

No	PERTANYAAN	JAWABAN	KELOMPOK
1	Untuk Wajib Pajak Istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami, NPWP16/NIK mana yang dipakai oleh istri untuk administrasi perbankan? Apakah akan mengikuti eKTP suami atau tetap menggunakan eKTP dirinya sendiri?	Untuk kepentingan identitas perpajakan atas wajib pajak Istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami ataupun terpisah pelaporan perpajakannya dengan suami, NPWP16 yang dipakai oleh istri untuk administrasi perpajakan dan perbankan adalah NIK istri yang bersangkutan, tidak menggunakan NIK suami.	Family Tax Unit
2	Pada proses yang ada sekarang, jika istri menggabungkan NPWP dengan suami, maka NPWP suami yang akan diberikan kepada Bank. Jika kondisi yang akan datang NIK istri akan digunakan sebagai NPWP istri, bagaimana Bank dapat memastikan bahwa NIK istri sebagai NPWPnya telah digabung dengan suaminya?	Bank dapat memastikan NIK istri sebagai NPWPnya telah digabung dengan suaminya dengan melakukan validasi NIK istri ke DJP, apabila hasil validasi menyatakan NIK istri valid maka terdapat 2 kemungkinan, NIK istri sudah menjadi NPWP tersendiri, atau NIK istri sudah tergabung dalam satu kesatuan ekonomi (family tax unit) dengan NPWP/NIK suami. Ketika NIK istri yang divalidasi sudah mendapatkan validasi dari DJP maka pelaksanaan kewajiban perpajakan si istri dapat menggunakan NIK-nya sendiri. Untuk saat ini (DJP Online) belum mendukung login menggunakan NIK istri, di sistem DJP nanti (Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP)), seorang istri dapat melakukan pendaftaran non wajib pajak (register only) sehingga bisa login ke portal wajib pajak pada SIAP. Kartu NPWP saat ini memang tidak mencantumkan NIK/NPWP istri karena sistemnya memang belum disiapkan/tidak mendukung hal	Family Tax Unit

		demikian. Pemutakhiran data anggota keluarga (family tax unit) dipersiapkan untuk diimplementasikan di sistem SIAP yang direncanakan berlaku pada tahun 2024. NIK istri sebagai NPWP16 akan dapat terlapor dalam SIAP dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemotongan/pelaporan pajak oleh pihak bank.	
3	<p>1. Untuk data NPWP yg gagal validasi, terutama ketidsesuaian kesesuaian nama dan tgl lahir apakah tidak bisa diedit di DJP online</p> <p>2. Bagaimana penerapan NIK NPWP 16 dlm format bukti potong pajak, apakah nantinya akan ada perubahan signifikan atas format pelaporan karena NPWP 15 digit sudah tidak digunakan</p> <p>3. Apakah sanksi yang dikenakan apabila sampai 31 Desember 2023 wajib pajak belum melakukan validasi</p> <p>4. Bagaimana jika status istri yg selama ini menggunakan npwp suami untuk perpajakannya, apakah yang perlu divalidasi adalah nik suami atau nik istri,</p>	<p>1. Tidak bisa, untuk nama ini harus ke KPP Terdaftar, tgl lahir bisa ke KPP terdekat</p> <p>2. Ya, semua pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan nantinya fully menggunakan NPWP 16 Digit</p> <p>3. Tidak ada sanksi, namun akan terhambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (contoh: tidak bisa dibuatkan bukti potong pajak/tidak bisa lapor pajak)</p> <p>4. Yang perlu dipastikan adalah NIK istri valid ke dukcapil, dan NIK istri didaftarkan pada Data Unit Keluarga (Family Tax Unit) suami</p>	Family Tax Unit
4	<p>Bagaimana dampaknya bagi bank apabila ada nasabah yang belum melakukan pepadanan npwp di djponline setelah 1 januari 2024. apakah bank bisa menggunakan</p>	<p>apabila belum dipadankan dengan NPWP dan status NPWP 16 digit nasabah belum valid, atau NIK nasabah belum masuk ke dalam Family Tax Unit (misal nasabah anggota keluarga non kepala</p>	Family Tax Unit

	data NIK sebagai NPWP walaupun belum dipadankan oleh nasabah.	keluarga) maka tidak akan dapat digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan	
5	Bagaimana jika kepala keluarga sudah pensiun apakah NPWP tetap aktif atau menggunakan NPWP istri yang masih aktif bekerja	NPWP Pensiunan masih memungkinkan aktif, kecuali tidak ada pelaporan/pembayaran selama 2 tahun maka ada kemungkinan dinonaktifkan.	Family Tax Unit
6	1. Untuk WP istri yang menggunakan NPWP Suami dan sudah update data di DJP terkait family tax. untuk pencatatan pada sistem Bank apakah dicatat NIK istri atau suami (Kepala keluarga) 2. Untuk definisi valid, apakah nama dan npwp harus 100% sama dengan data yang ada pada DJP? Apabila ada perbedaan nama karena ada singkatan antara database bank vs database pada DJP, apakah hasilnya menjadi valid atau tidak valid.	1. NIK istri 2. Tidak harus sama, ada standard kemiripan yang dipasang utk validasi data	Family Tax Unit
7	Apabila NPWP suami & Istri gabung, untuk pemadanan NIK hanya NIK suami apa atau suami & Istri	untuk data istri menggunakan NIK Istri	Family Tax Unit
8	jika memang DJP dan Dukcapil sudah bekerjasama dan terkait Family Tax Unit kalau memang NIK sudah tervalidasi ke Dukcapil apakah masih perlu dilakukan validasi kembali ke portalnpwp, mengingat data nasabah perbankan sangat banyak.	masih diperlukan, karena dasar validasinya adalah data FTU yang diinput wajib pajak, DJP tidak mendapatkan data anggota keluarga secara gelondongan dari Dukcapil	Family Tax Unit

<p>9</p>	<p>1. Apakah setiap warga negara yang memiliki NIK otomatis menjadi memiliki NPWP jika divalidasi oleh kantor pajak? 2. Dalam membuat Daftar nominative List - Biaya Promosi sesuai PMK 02/2010 disebutkan wajib mencantumkan NPWP. Apakah jika user hanya menyampaikan KTP/NIK apakah Kolom NPWP tersebut dapat diganti menjadi informasi NIK/KTP saja? karena NIK akan sama dengan NPWP 3. Jika NIK = NPWP, bagaimana dengan NPWP gabungan Istri ikut Suami, apakah pelaporan pajak mereka sendiri-sendiri berdasarkan NIK? apakah si istri harus validasi NIK nya jg di DJP Online. 4. Jika sudah melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP di DJP Online, apakah 2023 ini sudah bisa memberikan NIK saja untuk dijadikan NPWP untuk keperluan layanan pemerintahan / bank?</p>	<p>1. Tidak otomatis, hanya yang NIKnya diaktivasi yang menjadi NPWP 2. Hal ini dapat dilakukan 3. Untuk Istri yang gabung npwp suami maka dalam data NPWP dapat diisi NIK istri, si suami harus mendaftarkan nik istri dalam data unit keluarga (family tax unit) si suami, yang penting NIK si istri juga sudah divalidasi ke Dukcapil. 4. Karena saat ini masih proses transisi ada layanan yang sudah bisa menerima NPW 16 digit ada yang belum</p>	<p>Family Tax Unit</p>
<p>10</p>	<p>Bagaimana proses pelaporan apabila penerima penghasilan adalah NIK istri? Apakah pelaporan SPT Tahunan OP Suami akan linked dengan NIK istri jadi secara langsung akan match dengan total penghasilan suami-istri yang diterima dari pemberi penghasilan?</p>	<p>Betul, sang suami dapat melakukan konfirmasi melalui djponline atas NIK istri dan keluarganya untuk menjadi tanggungannya. Apabila ada pemotongan pajak atas penghasilan istri, dapat menggunakan NIK istri (bila sudah dilakukan registrasi ke dalam family tax unit oleh suami) dan bukti potong nantinya akan terpopulated ke dalam draft SPT suami.</p>	<p>Family Tax Unit</p>

11	Suami dan istri menggunakan NPWP suami, berarti NIK nya harus menggunakan NIK suami atau bagaimana?	dengan konsep Family Tax Unit, seluruh penghasilan yang diterima oleh 1 keluarga akan dilaporkan melalui NIK/NPWP suami. Apabila ada pemotongan penghasilan istri, dapat menggunakan NIK/NPWP istri dengan syarat suami telah melakukan konfirmasi melalui djponline bahwa sang istri merupakan tanggungan sang suami.	Family Tax Unit
12	<p>1. Apakah nanti E-faktur ada update terbaru soal NPWP 16 digit atau yang narasumber bilang tadi kita menggunakan 1 sistem terbaru?</p> <p>2. Jika Istri sudah tidak berkerja lagi apakah tetap harus pemadanan NIK dengan NPWP atau di gabungkan dengan suami? Jika iya, bagaimana Syarat-syaratnya?</p> <p>3. Untuk https://portalnpwp.pajak.go.id/. apakah diwajibkan untuk mengisi layanan Pemadanan? Jika iya, sampe kapan batas waktu pengisiannya?</p>	<p>1. Nanti akan ada sosialisasi secara mendetil jika sudah saatnya.</p> <p>2. Sebaiknya digabung dengan NPWP Suami, dan dimasukkan ke dalam daftar Family Tax Unit pada DJPOnline Suami, serta selanjutnya dilakukan penghapusan NPWP Istri (terkait penggabungan NPWP dapat menghubungi KPP terdekat).</p> <p>3. Layanan pemadanan yang diberikan oleh DJP adalah bentuk fasilitas bagi ILAP atas Implementasi NPWP 16 Digit dan NITKU sesuai amanat UU HPP dan PMK-112/2022, dan Perpres 83 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Layanan ini akan diberikan DJP sampai dengan implementasi nasional NPWP 16 Digit Jan 2024.</p>	Family Tax Unit
13	Bagaimana untuk pegawai yang NPWPnya jadi 1 dengan NPWP suami/istri, pernah diminta untuk integrasi NPWP ke NIK suami/istri tetapi ternyata tidak bisa (muncul Notif hubungi Dukcapil/KPP setempat) dan belum bisa	Segera update pada DJPOnline suami/istri (yang melakukan pelaporan pajak) pada field Family Tax Unit (Data Keluarga)	Family Tax Unit